

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Adi, Rianto, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2004).
- Ali, Zainuddin, Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Arba, H.M., Hukum Agraria Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- Arifin, Zainal, Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012).
- Azwar, Saifuddin, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).
- Grindle, Merilee S., Politics and Policy Implementation in The Third World, (New Jersey: Princeton University Press, 1980).
- Gunawan, Imam, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013).
- Hadi, Sutrisno, Metode Research, (Jakarta: Andi Offset, 1986).
- Harsono, Boedi, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya, Jilid I, (Jakarta: Djambatan, 2007).
- Hasan, M. Iqbal, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002).
- Idrus, Muhammad, Metode Penelitian Ilmu Sosial, (Jakarta: Erlangga, 2010).
- Iskandar, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif), (Jakarta: GP Press, 2008).
- Ismaya, Samun, Hukum Administrasi Pertanahan, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013).
- Limbong, Bernhard, *Hukum Agraria Nasional*, (Jakarta: Margaretha Pustaka, 2012).

Mertokusumo, R.M. Sudikno, Hukum dan Politik Agraria, (Jakarta: Karunika, 1988).

Muhammad, Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

Perangin, Effendi, Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum, (Jakarta: Rajawali, 1989).

Rahmadi, Takdir, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010).

Safitri, Myrna A. dan Tristam Moeliono, Hukum Agraria dan Masyarakat Di Indonesia: Studi Tentang Tanah, Kekayaan Alam, dan Ruang Di Masa Kolonial Dan Desentralisasi, (Jakarta, HuMa, 2010).

Sahnan, Hukum Agraria Indonesia, (Malang: Setara Press, 2018).

Setiawan, Guntur, Implemtasi dalam Birokrasi Pembangunan, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004).

Soemitro, Ronny Hanintjo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988).

SP Sangsun, Florianus, Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah, (Jakarta: Visimedia, 2007).

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2012).

Usman, Nurdin, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, (Jakarta: Grasindo, 2002).

Wibawa, Samodra, Kebijakan Publik, (Jakarta: Intermedia, 1994).

Widjaja, Gunawan, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).

B. Jurnal, Karya Ilmiah, dan Internet

Andini, Medina Praba, “Rekonstruksi Batas Bidang Tanah Sebagai Hasil Dari Mediasi Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Batas (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang)”, *Skripsi*, Universitas Negeri Semarang, 2017.

Arief, Anggraeny, “Pelaksanaan Asas Kontradiktur Delimitasi Dalam Proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap”, *Jurisprudentie*, Vol. 5 No. 1, Universitas Muslim Indonesia Makassar, 2018.

Brotoelarno, Soelarman, “Aspek Teknis Yuridis Pendaftaran Tanah Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997”, Makalah Seminar Nasional Kebijakan Baru Pendaftaran Tanah, Yogyakarta, 1997.

Rahayu, Mudji, “Aturan Hukum Atas Azas Contradictoir Delimitatie Dalam Pendaftaran Tanah”, *Maksigama Jurnal Hukum*, Tahun 18 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang, 2015.

Semarang, Pemerintah Kota, <https://semarangkota.go.id/mainmenu/detail/profil>, diakses (pada 5 Februari 2020, pukul 09:46 WIB).

Susanti, Ni Wayan Ari dan I Gusti Ayu Dike Widhyaastuti, “Pelaksanaan Asas “Contradictoire Delimitatie” Dalam Pendaftaran Tanah Pertama Kali Secara Sporadik Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli”, *Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 05 No. 1*, Universitas Udayana, 2017.

Tiku, Trigita, “Pelaksanaan Asas Kontradiktur Delimitasi Dalam Proses Pendaftaran Tanah Di Kota Makassar”, Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2015.

Yunian, Rizky, “Penerapan Asas Contradictoire Delimitatie Dalam Proses Pendaftaran Tanah di Kabupaten Klaten”, *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, 2017.

Qoyum, “Penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi Dalam Pendaftaran Tanah Sporadik Di Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang”, *Unnes Law Journal Vol. 1 No. 1*, Universitas Negeri Semarang, 2012.

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Menteri Negara Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997
Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang
Penyelesaian Kasus Pertanahan.